

# TERBENTUKNYA NEGARA DALAM KONSEP PEMIKIRAN IBNU KHALDUN

Moh. Ilyas Rolis, Dodik Harnadi

UIN Sunan Ampel Surabaya, STAI At Taqwa Bondowoso  
*ilyas.rolis@uinsby.ac.id*

## Abstract

The attention of researchers to explore the brilliant thoughts of Ibn Khaldun is so great. Khaldun is a multidisciplinary scientist. He has many statuses. However, several studies of Khaldun's thought generally focus on two main disciplines, namely sociology and politics. His prolegomena, entitled *muqaddimah*, record very clearly the impressions of Khaldun's thoughts in the fields of sociology and politics. Generally, the study of Khaldun's thought only takes one corner of the scientific discipline, it is sociology or politics. In fact, Khaldun's various political ideas are actually a combination of sociology and politics at the same time. The study in this paper takes a different point of view by presenting the dual ideas of Khaldun's sociology and politics. This literature study found that Ibn Khaldun was one of the leading thinker of the political sociology. His idea of political sociology is reflected in Khaldun's conception of Ashabiyah and nomadic society.

**Keywords:** Khaldun, Political Sociology, Ashabiyah, Nomadic

## Abstrak

Perhatian para peneliti untuk mengupas pemikiran cemerlang Ibnu Khaldun begitu besar. Khaldun adalah seorang ilmuwan multidisiplin. Banyak status yang disandangnya. Meski demikian, beberapa kajian mengenai pemikiran Khaldun umumnya terpusat pada dua disiplin utama, yaitu sosiologi dan politik. Karya prolegomena-nya bertajuk *muqaddimah*, merekam dengan sangat jelas jejak pikiran Khaldun di bidang sosiologi dan politik. Umumnya, studi mengenai pemikiran Khaldun hanya mengambil satu sudut disiplin keilmuan sosiologi atau politik. Padahal, pelbagai gagasan politik Khaldun sebetulnya adalah perpaduan antara sosiologi dan politik sekaligus. Studi dalam tulisan ini mengambil sudut pandang berbeda dengan mengetengahkan gagasan ganda sosiologi dan politik Khaldun. Studi literature ini menemukan bahwa Ibnu Khaldun adalah salah satu peletak dasar pemikiran sosiologi politik. Gagasan sosiologi politiknya tercermin dari konsepsi Khaldun mengenai Ashabiyah dan masyarakat nomaden.

**Kata Kunci:** *Khaldun, Sosiologi Politik, Ashabiyah, Nomaden*

Article History: *Received 22 April 2021, Revised: 15 April 2021, Accepted: 01 May 2021, Available online 01 June 2021*

## Pendahuluan

Ibnu Khaldun menjadi salah satu ilmuwan Islam yang reputasinya harum hingga kini. Gagasan-gagasannya yang lintas disiplinernya membuatnya menyandang beragam atribut ahli ilmu pengetahuan. Sebagian mengenalinya sebagai sejarawan, sebagian yang lain mengenalinya sebagai praktisi dan teoretisi politik. Sebagai sarjana dan diplomat, *Ibnu Khaldun ditempatkan sebagai salah satu ilmuwan luar biasa*. Pandangan politiknya mengenai *state formation* memengaruhi banyak pemikiran teori-teori politik setelahnya (Rosen, 2005)

Kecemerlangannya membentangi pelbagai disiplin keilmuan. Karena itu sorotan terhadapnya juga muncul dari beragam sudut pandang keilmuan (Naz, 2013; Shareef, 2018; Duran 2021). Khaldun menyandang banyak gelar. Selain sebagai ahli politik dan sejarah, beberapa diantaranya juga mengenalinya sebagai seorang peletak dasar sosiologi, *the founder of sociology* (Boland, 1971; Sorokin, 1946). Kitabnya, *muqaddimah*, menjadi salah satu karya paling monumental yang merekam betapa luasnya gagasan Ibnu Khaldun yang melintasi beragam disiplin keilmuan. Gagasan-gagasannya tidak hanya dikutip oleh para ilmuwan muslim kontemporer, tetapi juga oleh beberapa sarjana barat yang secara jujur mengakui kontribusinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan (see Ritzer, 2010:4; Rosenthal, 1992:53). Beberapa sarjana barat juga menulis karya biografi mengenai Ibnu Khaldun (Fromherz, 2011; Irwin, 2018) yang menandakan kedudukan khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Kontribusi Khaldun tidak bisa dipandang remeh. Sebagian menilai, *muqaddimah* memainkan peran penting dalam menyediakan basis konseptual, paradigmatic dan epistemologis terhadap kajian masyarakat dan peradaban (Ahmad, 2003:6). Karena itu, beberapa ilmuwan melakukan upaya alih bahasa *muqaddimah* ke dalam beberapa bahasa seperti Prancis (Slane, 1925) dan Inggris (Rosenthal, 2015) karena besarnya perhatian dunia untuk mengetahui warisan pemikiran Khaldun.

Beberapa kajian mengenai Ibnu Khaldun lebih banyak mengambil satu sudut pandang keilmuan. Katakanlah, banyak yang secara khusus memberikan atensi terhadap pemikiran sosiologi yang dia kembangkan (Dhaouadi, 2006; Alatas, 2006; Wardi, 1950). Demikian juga, banyak yang mengeksplorasi gagasan politiknya yang cemerlang (Rahman, 2021; Kayapinar,

2004; Baali, 1983;). Meski demikian, belum banyak yang secara khusus menelusuri gagasan sosiologi politik Khaldun.

Padahal, sosiologi memiliki kaitan yang erat dengan beberapa sains yang lain salah satunya adalah ilmu politik dan turunannya (Gidding, 1890). Demikian juga membaca pemikiran Khaldun, menghamparkan satu penegasan mengenai keterkaitan pandangan politik dan sosiologi. Hal ini sejalan dengan pandangan saat ini yang beranggapan bahwa meski negara dan masyarakat merupakan dua entitas berbeda, namun mengidentifikasi batas masing-masing membentur situasi rumit (Coslovsky, 2013).

Membaca gagasan politik Khaldun memang menarik kita untuk memahami gagasan sosiologinya. Ini menunjukkan bahwa perspetif politik Khaldun menyangkut perspektif sosiologi juga. Di sini, kita bisa memberikan gelar lain bagi Khaldun sebagai seorang sosiologi politik Islam. Sosiologi politik Ibnu Khaldun adalah inti dari gagasan politik yang dikembangkannya.

Sayangnya, beberapa kajian mengenai Khaldun masih menghamparkan pemikirannya dalam periuk-periuk yang berbeda, terutama mengenai pandangan sosiologinya pada satu periuk, serta pandangan politiknya pada periuk lainnya. Padahal, ada banyak alasan untuk meletakkan gagasan sosiologi dan politik Khaldun pada satu periuk. Alasan tersebut, seperti disinggung sebelumnya, berkaitan dengan kuatnya gagasan sosiologi politik yang dikembangkannya.

Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang berusaha mengulas gagasan sosiologi politik Ibnu Khaldun. Sebagai salah seorang ilmuwan muslim klasik, gagasan-gagasan Khaldun telah banyak menjadi pusat kajian para peneliti. Meski demikian, belum banyak di antara mereka yang memberikan fokus pada konstruksi teori sosiologi politik Khaldun. Studi ini diharapkan menjadi kaca mata baru dalam melihat pemikiran Khaldun, sekaligus membuka lebih luas perdebatan teoretis dalam konteks sosiologi politik yang dirumuskannya.

## **Biografi Ibnu Khaldun**

Popularitas Khaldun hampir tidak pernah surut sepanjang waktu, terbukti dengan kajian literatur yang terus menggali dan memburunya, demikian juga dengan semakin banyaknya

beberapa karya biografi ditulis mengenainya. Menguatnya atensi para ilmuwan untuk menelusuri kehidupan Khaldun membuka banyak sisi yang belum diketahui pada era-era sebelumnya.

Beberapa karya mengenai biografi Khaldun menyuguhkan sudut pandang yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki kekuatan yang tidak ditemukan pada karya yang lain. Tentu dari pada mempertentangkan satu dengan yang lain, beberapa karya biografi mengenai Khaldun saling melengkapi satu dengan yang lain

Konteks sosial yang menjadi dunia historisitas Ibnu Khaldun diketengahkan. Terutama dalam kaitannya dengan sejarah Ibnu Khaldun sebagai praktisi politik yang memengaruhi gagasan politiknya. Pada bagian ini perlu dipotret sketsa singkat mengenai sosial internal, intelektual internal, sosial eksternal dan intelektual eksternal yang membentuk gagasan politik Ibnu Khaldun (Ritzerl, 2010). Bagian ini penting disuguhkan karena beberapa ulasan mengenai sejarah hidup Khaldun seringkali mengabaikan keadaan-keadaan sosial (social circumstances) yang memengaruhi pemikirannya (Fromherz, 2011). Tulisan Fromherz berjudul *Ibnu khaldun: Life and Times* merupakan sedikit diantara karya biografi yang menekankan kepada arti penting lingkungan sosial yang membentuk pikiran Khaldun.

Data mengenai biografi Khaldun cukup banyak. Apalagi, Khaldun memang sempat menulis catatan biografinya sendiri. Catatan biografi yang ditulisnya berjudul *at-ta'rif bi Ibnī Khaldun wa rihlatuhu gharban wa syarqan*. Dalam penuturannya, dia dilahirkan pada tahun 732 hijriyah di daerah Tunisia (Khaldun, 2004). Tahun tersebut bertepatan dengan 1332 penanggalan masehi. Khaldun berasal dari keluarga terhormat (Fromherz, 2011). Koneksinya luas. Hal ini memungkinkan Khaldun terhubung dengan beberapa jaringan keilmuan yang juga luas. Khaldun tidak hanya mempelajari satu disiplin keilmuan. Pengalaman keilmuannya membentang luas beragam

disiplin mulai dari ilmu-ilmu yang disebutnya naqqli (based on religious text) hingga aqli (logical science).

Sebagai seorang ilmuwan lintas disiplin, kitab muqaddimah merekam jelas mengenainya. Selain itu, Khaldun juga merupakan keturunan bangsawan politik. Karena beberapa leluhurnya adalah seorang pejabat politik di kawasan Andalusia. Misalnya, Abu Bakar Muhammad bin Khaldun, kakek kedua Ibnu Khaldun, ditunjuk sebagai pejabat pada masa Abi Ishaq Al-Mustanshir. Demikian juga anaknya- kakek Ibnu Khaldun- menjadi pejabat politik pada era Abu Faris, suksesor Abu Ishaq (Inan, 1933:16)

Karena lahir dari lingkungan yang dekat dengan kekuasaan, maka kita bisa mengerti mengapa Ibnu Khaldun mampu melahirkan pemikiran yang kaya di bidang politik. Apalagi Ibnu Khaldun kemudian juga menjadi pejabat politik hingga beberapa kali. Misalnya, ketika migrasi ke Bijayah yang saat itu berada di bawah kekuasaan Bani Hafis. Di sana dia dianggap sebagai salah satu pejabat Negara. Demikian juga di Mesir, dibawah kekuasaan Malik Dzahir Abu Said Barquq, Ibnu Khaldun dipercaya sebagai pejabat yudikatif 1384 (Khaldun, 2004; Fromherz, 2011).

Dengan demikian, struktur keilmuan Khaldun, khususnya di bidang politik, dibentuk oleh kekayaan pengalaman hidupnya yang dekat dengan lingkungan kekuasaan. Pun juga oleh jaringan keilmuan luas yang dilaluinya. Kombinasi keduanya membuat gagasan politik Ibnu Khaldun tidak hanya memiliki arti praktis sehingga bisa direprikasi, tetapi juga teoretis sehingga bertahan lama.

Tentu Ibnu Khaldun tidak memaksudkan gagasannya semata sebagai sebuah panduan teknis dalam mengelola negara. Karena pengalaman historis dan factual yang dialami oleh Ibnu Khaldun semata diletakkan sebagai basis empiris untuk menciptakan konstruksi pemikiran politik yang senantiasa hidup. Karena itulah, sejalan dengan penilaian Irwin (2010), Ibnu Khaldun lebih mengemukakan konstruksi pesan

atau dari satu satu peristiwa masa lampau, ketimbang menghadirkannya sebatas sebagai sebuah objek arkeologis (Fromherz, 2011).

Beberapa kalangan melihat, kehebatan pemikiran Ibnu Khaldun harus dibaca dalam spectrum historisitasnya saat itu, karena pemikiran tokoh berkembang bersamaan dengan realitas zamannya. Bukan dengan membacanya dari perbandingan Ibnu Khaldun dengan pemikir-pemikir modern (Fromherz, 2011). Dengan kata lain, Ibnu Khaldun harus ditempatkan sebagai anak zamannya (Salama, 2011).

### **Sosiologi Politik antara Political Sociology dan Sociology of Politics**

Ada dua terminologi yang merujuk kepada disiplin keilmuan yang berpijak pada interseksi sosiologi dan politik, yaitu *sociology of politic* dan *political sociology*. Meskipun keduanya terlihat sama, namun beberapa kalangan menyebut kedua istilah memiliki maksud yang berbeda. Sartori (1969) menjelaskan perbedaan kedua istilah terletak pada kejelasan pemakaiannya. *sociology of politics* menunjukkan salah satu disiplin keilmuan yang berada di bawah lapangan sosiologi. Jadi kata *sociology of politic* merupakan sub rumpun sosiologi seperti sosiologi agama (*sociology of religion*), sosiologi hukum (*sociology of law*) dan seterusnya. Karena merupakan sum rumpun sosiologi, maka sosiologi politik beroperasi di atas pondasi perspektif sosiologis.

Sebaliknya, *political sociology* memiliki pengertian yang tidak sejelas istilah pertama. Artinya, istilah kedua ini dapat dipahami sebagaimana istilah pertama sebagai rumpun dari sosiologi. Demikian juga, istilah kedua ini dapat dijelaskan dalam pengertian lain merujuk kepada keterkaitan yang erat antara fenomena politik dengan ilmu pengetahuan sosial. Tentu, dibandingkan yang pertama, jangkauan analisis yang kedua ini memang tidak jelas (Sartori, 1969).

Dalam pemakaian yang sering dijumpai, istilah *political sociology* dan *sociology of politic* ditempatkan sebagai sub ilmu sosiologi. Padahal pemahaman tersebut lebih mewakili istilah *sociology of politic*. Secara praksis, kata *political sociology* ternyata lebih banyak digunakan daripada *sociology of politic* (Sartori, 1969; Rathore, 1986; Allardt, 2001; Janoski etc., 2005).

Rathore (1986) melihat *political sociology* sebagai buah dari perkawinan konsep sosiologi dan politik. Tanpa mereduksi *political sociology* ke dalam *sociology atau politic*, Rathore menekankan kepada dialektika kedua disiplin dalam membentuk sosiologi politik. Dalam elaborasinya, *political sociology* didefinisikan sebagai “*a mixture of sweet-scented material, borrowed from the disciplines of political science and sociology*” (Rathore, 1969).

Tulisan ini tidak hendak membandingkan kedua istilah serta mencari keunggulan yang satu atas yang lain. Kedua istilah, terlepas dari adanya perbedaan konseptual menurut beberapa kalangan, namun tetap menandakan satu benang merah yang sama, yaitu eratnya kaitan antara kajian sosial dengan politik. Untuk itulah, meski istilah *political sociology* dipilih untuk digunakan, itu tidak berarti menolak pemakaian *sociology of politic* sama sekali.

Hanya saja, istilah *political sociology* terlihat lebih tepat. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa istilah tersebut lebih bisa menjembatani perbedaan antara sosiologi dengan ilmu politik. Sebab, sosiologi dan ilmu politik merupakan dua disiplin yang berada pada dua ruang yang berbeda. Keduanya, meski memiliki kaitan erat, tetap terpisah jurang pemisah. Untuk menghubungkannya, yang diperlukan bukan mereduksi satu terhadap lainnya. Yang diperlukan adalah jembatan yang bisa menghubungkan tanpa saling mereduksi satu sama lain, jembatan multidisipliner tersebut adalah *political sociology*. Sebaliknya, *sociology of politic* adalah bentuk dari *sociological reduction of politic* (Sartori, 1969; Allardt, 2001).

## Ashabiyah: Perspektif Sosiologi Politik

Ibnu Khaldun dikenal sebagai figure yang memberikan perhatian terhadap dimensi yang tidak terpisahkan antara aspek sosial dan politik. Salah satu teori inti dari gagasan Ibnu Khaldun yang menekankan kepada proses pembentukan solidaritas sosial serta signifikansinya dalam pembentukan Negara adalah *ashabiyah* (Baali, 1988:43).

*Ashabiyah* ini merupakan salah satu faktor yang terbentuknya satu Negara. Ada dua faktor yang melatarbelakangi terbentuknya satu Negara. Yang pertama adalah *syaukah* di mana negara muncul dari proses yang didasarkan atas otoritas maupun paksaan. Sementara yang kedua, *ashabiyah*, dimana satu Negara lahir dari solidaritas sosial yang didasarkan atas ikatan kesukuan atau golongan (Turker, 2016)

Istilah *ashabiyah* digunakan Ibnu Khaldun untuk menyebut ikatan yang terbentuk atas dasar kesatuan genetika atas atribut lain. Meski demikian, Khaldun tidak pernah secara jelas mendefinisikan konsep tersebut. Beberapa istilah yang kemudian digunakan untuk memaknai konsep *ashabiyah* diantaranya adalah family, tribal, blood relationship and the others (Baali, 1988)

Terlepas dari tiadanya definisi yang tersedia, namun Khaldun memang memaksudkannya- sebagai salah satu- dalam pengertian ikatan darah. Sebab, menurut Khaldun, kesatuan nasab menjadi alasan paling alami dalam pembentukan solidaritas sosial. Solidaritas ini pada umumnya lahir dari ikatan yang mempertemukan mereka. Ikatan demikian dapat berbentuk kesatuan ras, kelompok, bahasa dan budaya. Pada akhirnya, kesamaan-kesamaan tersebut melahirkan apa yang saat ini disebut sebagai *nationality* (Abdullah, 2018)

Dalam uraiannya, Khaldun berbicara bahwa eksistensi ikatan kesukuan paling kentara terlihat dalam membangun kohesi di kalangan masyarakat pedesaan, albadwi. Hal ini menurutnya berbeda dengan masyarakat urban di mana ketun-

dukannya mereka untuk menjalin relasi sosial yang harmonis dan jauh dari permusuhan, lebih banyak dijalankan oleh institusi yuridis (*al-hukkam*) dan negara (*daulat*) (Khaldun, 2004:253).

Penekannya pada peran positif kesukuan atau kekeluargaan (*ashhabiyah*) juga memengaruhi pandangannya mengenai kepemimpinan (*riyasa*). Identitas kesukuan atau kekeluargaan yang membentuk solidaritas Ibnu Khaldun klasifikasi ke dalam dua kategori. Pertama, identitas kesukuan yang umum (*al-amm*). Kedua kesukuan yang bersifat khusus (*al-khass*). Dalam konteks pertama, Khaldun merujuk kepada ikatan sosial yang terjalin pada jalur geneologi yang lebih dekat. Sementara yang kedua terikat oleh garis kekeluargaan yang lebih jauh.

Karena kepemimpinan memerlukan ikatan yang kuat, maka *ashhabiyah* yang terikat oleh ikatan kesukuan yang lebih khusus lebih diperlukan dari pada ikatan yang lebih luas. Khaldun menganalogikan jika dalam ikatan sosial secara umum, ikatan yang kuat dibutuhkan untuk membangun relasi bersama, maka dalam satu kepemimpinan politik di mana ketundukan menjadi salah satu wujud legitimasi yang paling jelas, tentu memerlukan daya ikat yang lebih kokoh. Karena itulah, kesukuan yang didasarkan atas ikatan kekerabatan lebih dekat menjadi lebih dibutuhkan dalam membangun integrasi bangsa dalam satu ikatan kepemimpinan.

Mereka yang terikat oleh satu ikatan kekeluargaan yang khusus dan dekat, harus merupakan entitas yang paling kuat di antara entitas kesukuan lain dalam satu latar belakang entitas yang sama. Sebagaimana keluarga Qurays, memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan entitas kekeluargaan lain yang sama-sama berasal dari keturunan Adnan. Kata Khaldun:

*“Saat kepemimpinan hanya mungkin terjadi dengan proses dominasi, maka kesukuan yang berhak menyandangnya adalah yang paling kuat di antara suku-suku lain, sehingga dominasi terjadi dan kepemimpinan politik menjadi sempurna”* (Khaldun, 2004:260).

Pandangan Khaldun jelas merupakan satu bentuk eksklusivisme kebangsaan. Ini juga yang membuatnya memiliki pandangan yang sejalan dengan para pakar politik Islam yang meletakkan kepemimpinan Islam hanya di tangan satu klan semata, yaitu Qurays (Dogan, 2018). Sebaliknya, Khaldun memberikan pernyataan yang cenderung pesimis terhadap Negara yang diikat tidak oleh *ashabiyah*, misalnya nasionalisme atas dasar tanah air dalam konteks saat ini.

Khaldun, mencontohkan beberapa kesatuan militer yang pernah ada dalam sejarah permulaan Islam, di mana pengikatnya adalah tanah air seperti tentara Qinnasrin, tentara Damaskus, hingga Andalusia. Namun atribut tersebut menurutnya sebatas menjadi pelengkap dari ikatan nasab yang lebih mengikat relasi masing-masing. Namun, saat identitas kekeluargaan mengalami pembauran dengan identitas kekeluargaan yang lain, daya pengikat *ashabiyah* juga mengalami pelemahan dan pada akhirnya, hanya masyarakat pedesaan saja yang tetap memiliki ikatan kuat karena masih berperannya factor *ashabiyah* di dalamnya (Khaldun, 2004:258).

Menurut Khaldun, puncak dari eksistensi kesukuan adalah kerajaan (*almulku*) dalam pengertian yang saat ini mencakup negara. Khaldun memang membedakan antara kepemimpinan dan kekuasaan. Kepemimpinan ditempatkan pada level yang lebih awal dan lemah dari pada kekuasaan. Khaldun memberikan pembeda yang paling tegas di antara keduanya; kemampuan memaksa (*coercive power*).

Baik kepemimpinan politik maupun Negara, sama-sama membutuhkan *ashabiyah*. Sebab kesukuan adalah alasan masing-masing orang memiliki solidaritas dalam bentuk saling menjaga dan membela. *Riasah* di sini menurut ungkapan Ibnu Khaldun lebih menyerupai kepemimpinan komunal yang lebih banyak diikat oleh kesepahaman bersama. Sebaliknya, *al-mulk* adalah kerajaan atau Negara yang memiliki kemampuan memaksa kepada rakyat untuk patuh terhadap hukum-hukum yang ada (Khaldun, 2004:272).

Meski meletakkan kesukuan sebagai faktor penting dalam munculnya sebuah Negara, namun Khaldun juga mengakui terdapat batasan peran kesukuan dalam memengaruhi Negara. Dengan tegas Ibnu Khaldun menganggap bahwa peran ashabiyah melemah bahkan ditinggalkan saat eksistensi Negara sudah mapan (*sophisticated*). Kekuasaan Negara sudah mengalami beberapa kali suksesi sukses sehingga peran kesukuan menjadi semakin pudar pada titik sejarah tertentu.

Saat ikatan kesukuan memudar, pada akhirnya ikatan kebangsaan akan menuju kepada titik yang sama. Sebab, pengikat dasar yang melahirkan Negara sudah tidak ada. Seperti sebuah siklus, akan muncul kelompok dengan ikatan solidaritas lain yang masih kuat, untuk mengambil alih kekuasaan Negara. Namun pada akhirnya, siklus yang sama juga akan menimpa mereka di mana pada akhirnya kekuasaan mereka jatuh (Toynbee, 1965)

Ibnu Khaldun mencontohkan kekuasaan Bani Abbas. Jika pada awalnya, kekuasaan politiknya dibentuk atas dasar solidaritas sesama keturunan Abbas bin Abdul Muthallib, maka setelah mengalami beberapa fase suksesi kepemimpinan hingga masa Mu'tashim dan Watsiq, faktor ikatan kekeluargaan mulai memudar sebagai faktor ikatan politik di dalamnya. Bahkan, meski tetap berada dalam satu dinasti politik Abbasiyah, namun para pemimpin politik yang muncul tidak lagi eksklusif menjadi milik keturunan Abbas. Hal ini terbukti dengan naiknya para pemimpin dari Bani Saljuk sebagai pemimpin politik di dalam dinasti Abbasiyah (Khaldun, 2004:309).

### **Nomaden dan Jangkauan Kekuasaan Politik**

Selain membicarakan topik seputar ashabiyah, Khaldun juga berbicara mengenai jangkauan kekuasaan politik yang dikaitkan olehnya dengan pola kehidupan sosial masyarakat tertentu. Khaldun secara khusus menyoroti masyarakat pemburu, yang hidup nomaden tanpa terikat oleh ikatan tanah air tertentu. Masyarakat dengan tipologi demikian dalam pan-

dangan Ibnu Khaldun cenderung memiliki wilayah kekuasaan yang lebih luas dari pada masyarakat yang tinggal menetap dalam satu wilayah tertentu.

Dalam rasionalisasinya, Khaldun mengatakan:

*“Mereka para pemburu tidak memiliki tanah air tempat mereka hidup, serta negeri yang mengikat mereka. Ikatan terhadap pelbagai daerah dan tanah air bagi mereka adalah sama. Sehingga mereka tidak merasa hanya terikat dengan kekuasaan daerah mereka, maupun negeri seberang mereka...” (Khaldun, 2004:280).*

Disinilah Ibnu Khaldun membangun justifikasi atas luasnya wilayah yang dikuasai oleh bangsa Arab. Sebab, suku Arab kuno pada dasarnya merupakan penjelajah yang banyak menghabiskan waktunya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bangsa Arab berhasil melintasi Yaman menuju kawasan Maghrib, kemudian Iraq dan India. Menurut Khaldun, tidak satupun bangsa-bangsa lain yang mampu melakukan hal yang sama dengan Arab.

Pengalaman sejarah demikian membentuk kekuatan bangsa Arab. Khaldun percaya bahwa kaum Arab sebagaimana masyarakat nomadic lainnya, memiliki kekuatan karena mereka senantiasa merasa berada di dalam ancaman. Untuk bisa menghadapi ancaman di sekitar mereka, maka masyarakat primitive harus menjadi orang-orang yang kuat sehingga mampu mengatasi pelbagai bahaya yang mengancam mereka. Di samping itu, ikatan mereka menjadi semakin kuat satu sama lain. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan kehadiran orang-orang di sekitarnya (Onder & Ulasan, 2018)

### **Kesimpulan**

Pada akhirnya, political sociology Ibnu Khaldun harus mendapatkan porsi besar dalam pengertian lebih lanjut mengenai segi-segi pemikiran sosiologi dan politiknya. Ibnu Khaldun bahkan layak dianggap sebagai peletak dasar sosiologi politik, dari pada sebatas mengapresiasinya sebagai peletak dasar ilmu

sosiologi maupun ilmu politik. Hampir semua gagasan politik Ibnu Khaldun memiliki wajah sosiologi di dalamnya.

Itu terlihat dari betapa pandangan-pandangan politik yang dibangun Khaldun, senantiasa memiliki basis argumentasinya pada pandangannya mengenai pelbagai dinamika sosial di setiap kelompok masyarakat. Gagasan politik Ibnu Khaldun merepresentasikan hubungan erat antara politik dan anasir-anasir sosial. Untuk itulah, penelitian ini diharapkan dapat membuka semakin lebar perdebatan teoretik di bidang sosiologi politik secara umum maupun dalam lanskap pemikiran Khaldun secara khusus.

### **Daftar Rujukan**

- Abdullah, S. 2018. Ibn Khaldun's Theory of Good Governance in Achieving Civilization Excellence. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(9), 1321–1333
- Abdullah, S. 2018. Ibn Khaldun's Theory of Good Governance in Achieving Civilization Excellence. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(9), 1321–1333.
- Ahmad, Z. 2003. *The Epistemology of Ibn Khaldun*. London: Routledge
- Alatas, S. F. 2006. Ibn Khaldūn and Contemporary Sociology. *International Sociology*, 21(6), 782–795. <https://doi.org/10.1177/0268580906067790>
- Allardt, E. 2001. *Political Sociology*. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, Reference Work
- Allardt, Erik, 2001. *Political Sociology*. In: Neil Smelser, J., Paul Baltes, B. (Eds.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, vol. 11. Elsevier, New York and Amsterdam, pp. 11701–11706. and Thame's and Hudson Ltd.
- Baali, F. 1988. *Society, State, and Urbanism: Ibn Khaldun's Sociological Thought*. Albany: State University of New York Press

- Boland, B. J. 1971. A Preliminary Stocktaking. In *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (Vol. 59, pp. 157–242). Brill. <http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctvbqs4mn.8>
- Coslovsky, S. 2013. Two Contending Visions on the Law, State and Society. In *The Resolution of Land-Use Conflicts in Sao Paulo* (p. Page 2-Page 4). Lincoln Institute of Land Policy. <http://www.jstor.org/stable/resrep18418.4>
- Dhaouadi , M. 2006. The Concept of Change in the Thought of Ibn Khaldun and Western Classical Sociologists Islâm Araþtýrmalary Dergisi, Sayý 16, 2006, 43-87
- Dogen, R. 2018. Discussion over Theological and Political Foundations of Caliphate in Islam. *Journal of Islamic Studies and Culture* December 2018, Vol. 6, No. 2, pp. 1-8. DOI: 10.15640/jisc.v6n2a1
- Duran, Bünyamin. 2021. A Comparative Study: Ibn Khaldun's Asabiyah and Habermas' Life-World. *Journal of Ibn Haldun Studies, İbn Haldun Çalışmaları Dergisi*. Ibn Haldun University, vol. 6(2), pages 129-143, July
- Fromherz, A.J. 2011. *Ibnu Khaldun: Life and Times*. Edinburg: Edinburg University Press
- Gibb, H. A. R. 1933. The Islamic Background of Ibn Khaldūn's Political Theory. *Bulletin of the School of Oriental Studies, University of London*, 7(1), 23–31. <http://www.jstor.org/stable/607600>
- Giddings, F. H. 1890. The Province of Sociology. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 1, 66–77. <http://www.jstor.org/stable/1009059>
- Grine, F. & Khezzar, O. Y. 2018. Ibn Khaldun's Political Thought And Relevance: Abdallah Sharit's Critical Perspective. *Jurnal Al-Tamaddun*, Bil. 13 (2), 1-14 <https://doi.org/10.22452/JAT.vol13no2.1>.
- Inan, M. A 1933. *Ibnu Khaldun; Hayatuhu wa Turasuhu Al-Fikriy*. Kairo: Darul Kutub Mesin
- Irwin, R. 2018. *Ibnu Khaldun: an Intellectual Biography*. Princeton: Princeton University Press
- Islam, Jaan. 2016. Contrasting Political Theory in the East and West: Ibn Khaldun versus Hobbes and Locke. *\_International Journal of Political Theory\_* 1 (1):87-107.

- Janoski, T., Alford, R., Hicks, A., Schwartz, M. 2005. *The Handbook Of Political Sociology States, Civil Societies, And Globalization*. Cambridge: Cambridge University Press
- Jelena, V. 2015. Political Theory of Ibn Khaldun. *Kom: Časopis za Religijske Nauke*, Volume 4, Number 2, 2015, pp. 111-134(24) *Directory of Open Access Journals*. DOI: <https://doi.org/10.5937/kom1502111V>
- Kayapinar, M.A. 2004. *The Theory of Asabiya in Comparison with the Social Contract Approach (an interpretive study in comparative political theory)*. Sais, 2004
- Khaldun, I. 2004. Atta'rif Bi Ibni Khaldun wa Rihlatihi Gharban wa Syarqan 27-28, in *Rihlatu Ibni Khaldun*. Bairut: Darul Kutub
- Naz, H. 2013. Political Thoughts of Ibn Khaldun And Machiavelli: A Comparative Study In A Historical Perspective. (2013). *Journal of Social Sciences and Humanities*, 52(2), 25–37. Retrieved from <https://jssh-uok.com/oj/index.php/jssh/article/view/175>
- Onder, M. & Ulasan, F. 2018. Ibnu Khaldun's Cyclical Theory on The Rise and Fall of Sovereign Powers: The Case of Ottoman Empire" *Adam Akademi*, 8/2, 231-266. DOI: 10.31679/adamakademi.453944
- Önder, M., & Ulaşan, F. 2018. Ibnu Khaldun's Cyclical Theory on the Rise and Fall of Sovereign Powers: The Case of Ottoman Empire. *ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(2), 231-266.doi: 10.31679/adamakademi.453944
- Oveisi, M. 2020. Theory of Government in the Political Idea of Ibn Khaldun. 7(26), 121-146. doi: 10.22034/sej.2021.1903-156.1252
- Qadir, M. A. 1941. The Social And Political Ideas of Ibn Khaldun. *The Indian Journal of Political Science*, 3(2), 117–126. <http://www.jstor.org/stable/42743704>
- Rahman, H. 2021. From al-Farabi to Ibn Khaldun; the perception of state in the early Muslim intellectual's writings. *Liberal Düşünce Dergisi* 26(103):237-258. DOI: [10.36484/liberal.743630](https://doi.org/10.36484/liberal.743630)
- Rahman, Hafijur. 2021. From al-Farabi to Ibn Khaldun; the perception of state in the early Muslim intellectual's writings. *Liberal Düşünce Dergisi*. 26. 237-258. [10.36484/liberal.743630](https://doi.org/10.36484/liberal.743630).

- Rathore, I. S. 1986. Political Sociology: Its Meaning, Evolution and Scope. *The Indian Journal of Political Science*, 47(1), 119–140. <http://www.jstor.org/stable/41855222>
- Ritzer, G. 2010. *Sociological Theory*. New York: McGraw Hill
- Rosen, L. 2005. Theorizing from Within: Ibn Khaldun and His Political Culture. *Contemporary Sociology*, 34(6), 596–599. <https://doi.org/10.1177/009430610503400604>
- Rosenthal, F. 1992. *The Classical Heritage in Islam*. London: Routledge
- Rosenthal, F. 2015. *The Muqaddimah : An Introduction to History*. Princeton: Princeton University Press.
- Salama, MR. 2011. Islam, Orientalism and Intellectual History: Modernity and The Politics of Exclusion Since Ibnu Khaldun. London: IB Taurits
- Sartori, G. 1969. From the Sociology of Politics to Political Sociology. *Government and Opposition*, 4(2), 195-214. doi:10.1111/j.1477-7053.1969.tb00173.x
- Shareef, Umar. 2018. Ibn Khaldun: Scientific Instruction as Prolonging the Polity. *Journal of Ibn Haldun Studies [Ibn Haldun Çalışmaları Dergisi]*, Ibn Haldun University, vol. 3(2), pages 239-258, July.
- Slane, W. M. de. 1925. *Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale*. Paris: P. Geuthner
- Sorokin, P. (1946). *Society, Culture and Personality*. New York: Harper Brothers Pub.
- Toynbee, Arnold .1965. *A Study of History*, Reprint, London: Oxford University Press
- Turker, O. 2016. The Nature of Kingship (Mulk) in the Context of Continuity and Change in the Thought of Ibn Khaldun. *İbn Haldun Çalışmaları Dergisi*, 1 (1), 2016, 141-160
- Turker, Ömer. 2009. The Nature of Kingship (Mulk) in the Context of Continuity and Change in the Thought of Ibn Khaldun. “The 2nd International Ibn Khaldun Symposium“ organized on 29-31 May 2009 in Istanbul
- Wardi, A.H. 1950. *A Sociological Analysis of Ibnu Khaldun's Theory: A Study in the Sociology of Knowledge*. Texas: University of Texas